



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOORHAIDI
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 993481

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.661.500.000**

1. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
2. Tanah Seluas 62 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL
SENDIRI Rp. 310.000.000
3. Tanah Seluas 124 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah Seluas 226 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI
Rp. 226.000.000
5. Tanah Seluas 158 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 1.750.000.000
6. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL
SENDIRI Rp. 425.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **765.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC VCT CKD Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 310.000.000
2. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA D1A02N19M1 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000



4. MOTOR, VESPA SPRINT S 150 TFT Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000

5. MOBIL, HONDA HONDA HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 378.000.000

6. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.251.133.133

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.677.633.133

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.677.633.133

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.